



Radar Bali

BKK Desa Adat Se-Badung Melimpah

Total Rp 38 Miliar,
Desa Adat Rp 225 Juta,
Subak Rp 50 Juta

MANGUPURA - Keuangan desa adat di Kabupaten Badung bakal semakin melimpah. Selain mudah mendapat bantuan dari Pemkab Badung, tidak lama lagi Pemprov Bali juga akan menggelontorkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa adat se-Badung. Satu desa adat diguyur Rp 225 juta. Tidak hanya desa adat. Subak juga kecipratan BKK. Satu subak mendapat Rp 50 juta. Total anggaran yang dialokasikan pada 2018 sebesar Rp 38 miliar lebih. Dana itu diperuntukkan

122 Desa Adat, 119 Subak dan 93 Subak Abian. Besarnya bantuan ini terungkap saat tim Pemprov Bali menggelar sosialisasi BKK di Puspem Badung, kemarin (30/1).

Sosialisasi yang dihadiri Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bali diwakili Kabid Pemerintahan Made Redy Yuliarmawan dan Kadis PMD Kab Badung Putu Gede Sridana, diikuti para Camat, Perbeke/Lurah, Bendesa Adat dan Pekaseh/Kelian subak se-Kabupaten Badung.

Wabup Suiasa mengingatkan desa adat dan subak yang akan menerima bantuan. Dana bantuan harus tepat sasaran dan tepat guna karena sebagai

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Dalam proses pencairan BKK ini, Bendesa dan Kelian Subak wajib membuat serta melengkapi administrasi melalui proposal. Setelah dana digunakan juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban," tandas Suiasa.

Lebih lanjut, sesuai UU No. 6/2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Suiasa berharap, selain menginformasikan dana yang diberikan, juga menyampaikan petunjuk teknis terkait penggunaan dan mekanisme pencairan sehingga para bendesa dan pekaseh menjadi lebih memahami dan tidak salah dalam penggunaan

anggaran. "Harus dipahami betul proses penggunaan BKK, sehingga dapat digunakan secara proporsional," tukas mantan politisi Golkar yang kini menjadi anggota PDIP itu.

Dana BKK yang diberikan dalam upaya menjaga pelestarian adat, seni, dan budaya. Dengan kucuran dana BKK, diharapkan Desa Adat maupun Subak mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dengan terus mendorong masyarakat untuk menjaga serta melestarikan adat, seni dan budaya di era globalisasi.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan, Dinas PMD Provinsi Bali, Made Redy Yuliarmawan menjelaskan, pemberian BKK ini bertujuan untuk member-

ikan stimulan kepada Desa Pekraman dan Subak dalam rangka pelaksanaan pembangunan, meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat.

Selain itu, memberdayakan Desa Pekraman dan Subak dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan unsur *Tri Hita Karana*. Disampaikan, mulai tahun 2018 untuk desa pekraman yang ada di wilayah kelurahan ada perubahan pola yang disamakan dengan BKK dan penyaluran anggarannya melalui APBD Kabupaten/Kota. "Untuk kegiatan di Kelurahan, pemerintah daerah akan menunjuk SKPD leading dalam pelaksanaan BKK ini, karena betul-betul dalam bentuk program dan kegiatan," paparnya. (san/dot)

Edisi : Rabu, 31 Januari 2018

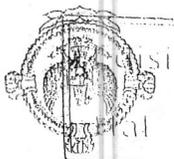
Hal. : 3

Hal	:	
Edisi	:	

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

SEKELUARAN PERIODE
NUSA BALI



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Nusa Bali



Gedung Sumbangan Sudah Bisa Digunakan

■ Kapolda Resmikan GSG Senilai 7,2 Miliar

■ Selanjutnya Polsek Kuta Selatan yang Dibangun

DENPASAR, TRIBUN BALI - Gedung Serba Guna (GSG) berlantai tiga nampak menjulang di Mapolresta Denpasar, Selasa (30/1). Gedung yang biayanya sumbangan dari Pemkab Badung senilai Rp 7,2 miliar ini sudah bisa digunakan.

Kapolda Bali, Irjen Petrus Go-

lose menyatakan, gedung yang dinamai Pesat Gatra itu akan banyak berfungsi sebagai penunjang kinerja anggota Polresta Denpasar. Apalagi, Polresta Denpasar akan menjadi *pilot project* Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Bali. "Dengan akan dicanangkannya

Zona Bebas Korupsi, maka dengan ini fasilitas gedung menjadi bagian penunjang untuk dilakukannya *zero corruption* di Bali," ucapnya Selasa (30/1).

Golose menyebut, gedung ini adalah apresiasi Pemkab Badung atas kinerja Polri yang menjaga kea-

manan. "Kini juga sedang berjuang supaya Polresta Denpasar mendapat remunerasi (tunjangan kinerja) kepada anggota. Sehingga ada taraf hidup lebih baik," ungkapnya.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, menyatakan, karena Polri melaksanakan salah satu tugas

melindungi masyarakatnya, maka dibutuhkan tunjangan fisik berupa gedung. Sebab, warga juga membutuhkan kenyamanan.

"Sebagai alat negara (Polri) diberi fasilitas. Sehingga tugas kepada masyarakat dalam memberi rasa aman dan nyaman tidak terkendala," te-

gasnya.

Selain di Polresta Denpasar, sambung Giri, Pemkab juga sudah memberikan bantuan pembangunan gedung di Polsek Petang dan rencananya akan dalam pembangunan Polsek Kuta Selatan. (ang)



Warga Pertanyakan Proyek Senderan 1,5 Kilometer

■ Realisasi Terkendala Gejolak Giri Tohlangkir

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Warga Desa Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat mendatangi kantor desa setempat, Selasa (30/1). Mereka melayangkan protes terhadap proyek senderan jalan yang dianggarkan tahun 2017 namun belum dikerjakan.

Bandesa Adat Badeg Kelodan, I Gusti Lanang Kadek Budiarta mengatakan, warga merasa dibohongi. Sebab, proyek senderan sepanjang 1,5 kilometer yang dianggarkan desa hingga kini tak kunjung terealisasi.

"Padahal di baliho program kegiatan desa tertulis pembangunan senderan jalan dianggarkan tahun 2017. Sekarang sudah 2018, belum ada tanda pengerjaan senderan," kata Budiarta.

Massa yang mengenakan pakaian adat diterima Perbekel Sebudi, I Nyoman Tinggal, didampingi Camat Selat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Kapolsek Selat. Budiarta menilai, senderan jalan dan got yang dianggarkan tahun 2017 sifatnya sangat mendesak. Jalan dari Badeg Kelodan hingga kuburan rawan tergerus karena tak ada senderan. Kekhawatiran warga pun terbukti. Terdapat ada tiga titik yang tergerus.

"Karena kondisi inilah kami datang meminta kejelasan tentang penyenderan. Mengapa penyenderan tak dilakukan di tahun 2017, apa alasannya? Terus anggarannya dikemakan," tanya Budiarta.

Perbekel Sebudi, I Nyoman Tinggal mengatakan, dalam rancangan anggaran program pembuatan senderan diang-



TRIBUN BALI/SAIFUL ROHIM

BERTANYA - Warga Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat mendatangi kantor desa menanyakan realisasi proyek senderan, Selasa (30/1).



Padahal di baliho program kegiatan desa tertulis pembangunan senderan jalan dianggarkan tahun 2017.

Gusti Budiarta

Bandesa Adat Badeg Kelodan

garkan tahun 2017. Sumber dananya dari bagi hasil pajak dan retribusi dengan jumlah sekitar Rp 270 juta.

Program pengerjaan senderan di Badeg Kelodan belum dilakukn karena anggaran dari retribusi pajak baru cair pertengahan Agustus 2017. "Karena cairnya bulan Agustus, penyenderan jalan ren-

cana dikerjakan September 2017," kata Tinggal.

Namun saat memasuki bulan September, Gunung Agung naik status dari Siaga ke Awas. Desa Sebudi pun dinyatakan masuk kawasan rawan bencana (KRB) III. Semua warga direkomendasikan mengungsi oleh pemerintah.

"Karena kondisi genting, pengerjaan senderan dipending dan direncanakan tahun 2018 mendatang. Saat Gunung Agung Awas, harga pasir dan batu juga naik. Angkanya tidak sesuai dengan RAB yang dipasang," ujar Tinggal.

Warga juga mempertanyakan tak cairnya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk 11 desa adat dan 11 Subak di Desa Sebudi yang jumlahnya mencapai Rp 2,2 miliar. Penyebabnya ternyata sama, Dana BKK tak dicairkan lantaran saat itu warga berada di pengungsian. "Kalau dicairkan takutnya keburu lambat. Pikiran kita saat itu juga lagi kalut di pengungsian," ujar Tinggal. (ful)

Edisi : Rabu, 31 Januari

Hal : 9